

PDIP: UNJ Tak Boleh Hajar Akademisi yang Kritis pada Kekuasaan

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 31/01/2025



ORINEWS.id – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ([PDIP](#)) mengkritik pencopotan Ubedillah Badrun dari jabatan Kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Terlebih, pencopotan itu ditengarai karena Ubedillah bersikap kritis terhadap penguasa.

“Lembaga Pendidikan seperti UNJ yang harusnya tetap menjaga sikap kemerdekaan akademisnya tampaknya menjadi alat kekuasaan bak palu godam yang menjatuhkan sanksi dan menghajar akademisnya yang kritis pada kekuasaan,” sesal Jurubicara DPP PDIP Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Jumat, 31 Januari 2025.

Ubedillah diketahui merupakan salah satu pihak yang melaporkan dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI [Joko Widodo](#) ([Jokowi](#)) dan keluarganya ke Komisi Pemberantasan

Korupsi ([KPK](#)).

Atas dasar itu, Guntur menilai, apabila pencopotan Ubedilah karena melaporkan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya ke KPK maka Rektor UNJ telah bertindak sewenang-wenang.

“Sikap Rektor UNJ yang secara sewenang-wenang mencopot Ubedilah Badrun menjadi preseden buruk akan masa depan kampus yang independen dan kritis,” tegasnya.

Terlebih, kata Guntur, dalam draft revisi UU Minerba yang baru disahkan sebagai usul insiatif DPR terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia perguruan tinggi, dibolehkan mengelola tambang.

“Nantinya kampus akan diberi jatah pengelolaan tambang akan semakin mematikan daya kritis dan independensi dari lembaga pendidikan tinggi di negeri ini,” pungkasnya.

Diberitakan Kantor Berita [Politik](#) RMOL sebelumnya, Ubedilah yang merupakan akademisi Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi (Kepala Departemen) Pendidikan Sosiologi UNJ oleh Rektor UNJ. Pencopotan dilakukan sebelum waktunya karena jabatan itu seharusnya diemban Ubeidilah hingga 2027.

“Iya, saya sudah tidak lagi menjabat sejak 24 Januari 2025. Posisinya telah digantikan oleh Plt (pelaksana tugas). Masa jabatan saya menurut SK Rekor No.1995/UN39/HK.02/2023 adalah untuk periode 2023-2027. Tetapi diberhentikan pada 25 Januari 2025 . Tidak apa-apa Mas, itu otoritas Rektor, mungkin punya maksud baik, saya tidak tahu apa alasannya,” kata Ubedilah kepada redaksi, Kamis, 30 Januari 2025.[source:rmol]